

## DAMPAK AKTIVITAS INDUSTRI TERHADAP PERUBAHAN TATA GUNA LAHAN DAN URBANISASI DI WILAYAH PESISIR

Oleh:

**Dina Argarani<sup>1</sup>**

**Dina Afriati<sup>2</sup>**

**Evi juliyawati<sup>3</sup>**

**Murni Intan Sari<sup>4</sup>**

**Alif Rakhmam Setyanto<sup>5</sup>**

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Alamat: Jl. Jalan Letnan Kolonel H Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Kec. Sukarame,  
Kota Bandar Lampung, Lampung (35131).

Korespondensi Penulis: [dinaargarani2115@gmail.com](mailto:dinaargarani2115@gmail.com), [dinafriati@gmail.com](mailto:dinafriati@gmail.com),  
[evijuliyawati21@gmail.com](mailto:evijuliyawati21@gmail.com), [murniintansari90@gmail.com](mailto:murniintansari90@gmail.com),  
[aliefrakhmansetyanto@radenintan.ac.id](mailto:aliefrakhmansetyanto@radenintan.ac.id).

**Abstract.** Coastal areas are strategic regions that experience significant development pressure due to the rapid growth of industrial activities, urban expansion, and increasing demand for land to support various economic sectors. Industrial development along the coast has accelerated the conversion of land from agricultural zones, mangrove forests, and open green spaces into industrial estates, residential areas, and supporting infrastructure. This land-use change triggers spatial transformation and affects the socio-economic dynamics of local communities, including shifts in livelihoods, increased migration flows, and the emergence of new settlements that expand the urban footprint. Urbanization, driven by industrial growth, intensifies environmental pressure through higher waste generation, degradation of coastal ecosystems, and declining soil and water quality. If poorly managed, these transformations heighten the vulnerability of coastal regions to hazards such as shoreline erosion, tidal flooding, and reduced environmental carrying capacity. This article analyzes the interrelationship between industrial activities, land-use change, and urbanization in coastal areas and identifies the

Received October 24, 2025; Revised November 09, 2025; November 20, 2025

\*Corresponding author: [dinaargarani2115@gmail.com](mailto:dinaargarani2115@gmail.com)

# DAMPAK AKTIVITAS INDUSTRI TERHADAP PERUBAHAN TATA GUNA LAHAN DAN URBANISASI DI WILAYAH PESISIR

*challenges and implications for sustainable coastal management. The findings are expected to contribute to coastal spatial planning and inform policy-making for future coastal resource governance.*

**Keywords:** *Industry, Land-Use Change, Urbanization, Coastal Areas.*

**Abstrak.** Wilayah pesisir merupakan kawasan strategis yang mengalami tekanan pembangunan cukup tinggi akibat berkembangnya aktivitas industri, urbanisasi, dan kebutuhan ruang untuk berbagai kegiatan ekonomi. Industrialisasi yang tumbuh pesat di pesisir mendorong alih fungsi lahan dari kawasan pertanian, mangrove, dan ruang terbuka menjadi kawasan industri, permukiman, dan infrastruktur pendukung. Perubahan tata guna lahan ini memicu transformasi spasial dan memengaruhi kondisi sosial-ekonomi masyarakat setempat, termasuk pergeseran mata pencaharian, peningkatan arus migrasi, serta munculnya permukiman baru yang memperluas kawasan terbangun. Urbanisasi yang terjadi sebagai konsekuensi dari pertumbuhan industri memperkuat tekanan terhadap lingkungan pesisir melalui meningkatnya limbah, berkurangnya ekosistem penyangga, serta menurunnya kualitas tanah dan air. Jika tidak dikelola dengan baik, perkembangan ini dapat menimbulkan kerentanan seperti abrasi, banjir rob, dan penurunan daya dukung lingkungan. Artikel ini menganalisis keterkaitan antara aktivitas industri, perubahan tata guna lahan, dan urbanisasi di wilayah pesisir, serta mengidentifikasi tantangan dan implikasinya terhadap pengelolaan wilayah secara berkelanjutan. Temuan kajian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi perencanaan tata ruang pesisir dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan sumber daya pesisir di masa mendatang.

**Kata Kunci:** Industri, Perubahan Tata Guna Lahan, Urbanisasi, Wilayah Pesisir.

## LATAR BELAKANG

Wilayah pesisir merupakan kawasan strategis yang memiliki nilai ekonomi tinggi karena menjadi pusat berbagai aktivitas sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dalam beberapa dekade terakhir, pesisir mengalami tekanan pembangunan yang semakin besar seiring meningkatnya kebutuhan lahan untuk industri, permukiman, dan infrastruktur pendukung. Perkembangan aktivitas industri di wilayah pesisir tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membawa konsekuensi terhadap perubahan struktur

ruang dan pola pemanfaatan lahan. Alih fungsi lahan yang terjadi cenderung mengarah pada berkurangnya lahan pertanian, ruang terbuka hijau, dan kawasan konservasi yang digantikan oleh bangunan industri maupun permukiman baru.

Aktivitas industri di kawasan pesisir juga memicu proses urbanisasi yang berlangsung secara cepat. Keberadaan industri menarik arus migrasi penduduk, baik dari wilayah hinterland maupun daerah lainnya, untuk mencari peluang pekerjaan dan meningkatkan taraf hidup. Kondisi ini menyebabkan laju pertumbuhan penduduk di kawasan pesisir meningkat secara signifikan, sehingga memperluas wilayah terbangun dan mengubah struktur sosial-ekonomi masyarakat. Urbanisasi yang tidak terkendali seringkali menimbulkan berbagai permasalahan, seperti ketimpangan pemanfaatan lahan, peningkatan permukiman informal, tekanan terhadap lingkungan, dan penurunan kualitas ekosistem pesisir.

Perubahan tata guna lahan dan urbanisasi akibat aktivitas industri memiliki dampak jangka panjang terhadap keberlanjutan wilayah pesisir. Jika tidak dikelola secara tepat, perkembangan industri dapat menyebabkan degradasi lingkungan, hilangnya fungsi ekologis kawasan pesisir, serta meningkatnya risiko bencana seperti banjir rob dan abrasi. Oleh karena itu, analisis mengenai bagaimana aktivitas industri memengaruhi perubahan tata guna lahan dan memicu urbanisasi menjadi penting untuk memahami dinamika pembangunan pesisir secara komprehensif. Kajian ini diperlukan sebagai dasar penyusunan kebijakan penataan ruang, pengelolaan lingkungan, serta strategi pembangunan berbasis keberlanjutan.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji dampak aktivitas industri terhadap perubahan tata guna lahan dan proses urbanisasi di wilayah pesisir. Dengan melakukan analisis terhadap pola perkembangan industri, perubahan spasial, serta dinamika sosial-ekonomi masyarakat pesisir, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan penataan wilayah pesisir yang lebih berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Deskriptif kualitatif adalah jenis penelitian yang mengumpulkan informasi berupa data

# **DAMPAK AKTIVITAS INDUSTRI TERHADAP PERUBAHAN TATA GUNA LAHAN DAN URBANISASI DI WILAYAH PESISIR**

dari berbagai literatur, seperti buku, jurnal, artikel, dan sumber online, untuk meneliti sebuah topik (Sugiyono, 2020).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami dampak aktivitas industri terhadap perubahan tata guna lahan dan urbanisasi di wilayah pesisir. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menggali makna, pandangan, serta pengalaman para pemangku kepentingan seperti masyarakat pesisir, pekerja industri, dan pemerintah daerah, sehingga diperoleh pemahaman komprehensif tentang dampak industrialisasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Transformasi wilayah pesisir dalam beberapa dekade terakhir banyak dipengaruhi oleh berkembangnya aktivitas industri yang semakin meluas. Kehadiran berbagai sektor industri di kawasan pesisir membawa konsekuensi yang kompleks, baik terhadap kondisi fisik kawasan maupun terhadap struktur sosial-ekonomi masyarakat setempat. Industri berperan sebagai motor penggerak pembangunan dan penyedia lapangan kerja, namun pada saat yang sama mendorong terjadinya perubahan tata guna lahan yang cukup signifikan serta memicu arus urbanisasi baru ke wilayah pesisir. Perubahan ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dan membentuk dinamika baru dalam pengelolaan ruang pesisir.

Oleh karena itu, analisis terhadap perkembangan industri, perubahan tata guna lahan, urbanisasi, serta dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang ditimbulkannya menjadi sangat penting untuk memahami arah perubahan wilayah pesisir secara menyeluruh. Bagian berikut menguraikan berbagai aspek tersebut secara terstruktur guna memberikan gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana industrialisasi membentuk karakter dan keberlanjutan kawasan pesisir.

### **Perkembangan Aktivitas Industri Di Wilayah Pesisir**

Perkembangan aktivitas industri di wilayah pesisir menunjukkan dinamika yang signifikan seiring dengan meningkatnya perhatian terhadap potensi ekonomi dan sumber daya yang ada di daerah pesisir. Wilayah pesisir sering menjadi pusat kegiatan industri maritim, pengolahan hasil perikanan, pariwisata pantai, dan pengembangan infrastruktur pelabuhan. Industri di wilayah ini tidak hanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi

lokal, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir (OKNIARTI, 2010).

Perkembangan aktivitas industri di wilayah pesisir telah menjadi fokus penting dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, terutama di Indonesia yang memiliki garis pantai sangat panjang. Aktivitas industri di pesisir meliputi beberapa sektor utama yang saling mendukung, antara lain pengolahan hasil laut, pengembangan industri perkapalan, pelabuhan, serta resort dan pariwisata pantai. Industri-industri ini tidak hanya menciptakan nilai tambah ekonomi tetapi juga menyediakan lapangan kerja yang cukup besar bagi masyarakat pesisir.

Pengolahan hasil laut menjadi salah satu sektor utama yang menghubungkan nelayan dengan pasar yang lebih luas, melalui proses seperti pengolahan ikan segar menjadi produk olahan yang siap dikonsumsi atau diekspor. Industri perkapalan dan pelabuhan juga berkembang pesat untuk mendukung kegiatan ekspor-impor dan transportasi laut, yang semakin modern dan efisien. Sektor wisata pantai turut menyumbang perlambatan pertumbuhan ekonomi lokal dengan pengembangan ekowisata dan fasilitas rekreasi yang menarik wisatawan domestik maupun internasional.

Secara khusus, pemerintah Indonesia meluncurkan program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) sebagai bentuk transformasi modernisasi kawasan pesisir. Program ini memiliki tujuan strategis untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan nelayan melalui pembangunan infrastruktur seperti dermaga, gudang beku, pabrik es, sentra kuliner, dan fasilitas pelatihan. Selain itu, KNMP memperkuat kelembagaan nelayan dan akses pasar serta adopsi teknologi perikanan modern, sehingga nelayan tradisional dapat bersaing secara ekonomi di tingkat lokal maupun global. Anggaran besar sekitar Rp22 miliar per lokasi disiapkan untuk membangun fasilitas dan modal kerja yang dibutuhkan. Pada tahap awal, pemerintah menargetkan pembangunan 100 kampung nelayan dengan rencana mencapai 1.100 kampung hingga 2027, yang menunjukkan komitmen jangka panjang untuk kemandirian ekonomi masyarakat pesisir.

Meski demikian, perkembangan industri pesisir juga membawa beberapa tantangan kritis. Pertama, tekanan terhadap lingkungan pesisir yang rentan mengalami kerusakan jika aktivitas industri dan pariwisata tidak dikelola secara berkelanjutan. Kedua, ketimpangan sosial ekonomi dapat meningkat antara nelayan tradisional yang bergerak dalam skala kecil dengan industri besar yang memiliki modal lebih besar dan

# **DAMPAK AKTIVITAS INDUSTRI TERHADAP PERUBAHAN TATA GUNA LAHAN DAN URBANISASI DI WILAYAH PESISIR**

teknologi yang lebih maju. Oleh karena itu, strategi pengembangan harus memastikan adanya inklusi sosial dan perlindungan lingkungan agar pembangunan industri pesisir tidak meninggalkan kelompok masyarakat kecil dan menjaga kelestarian ekosistem pesisir.

## **Dampak Aktivitas Industri Terhadap Perubahan Tata Guna Lahan**

Aktivitas industri di wilayah pesisir sering kali mendorong alih fungsi lahan secara signifikan, yaitu konversi lahan produktif seperti pertanian, tambak, atau vegetasi pesisir menjadi lahan non-pertanian yang didominasi kawasan industri, permukiman, dan infrastruktur pendukung. Fenomena ini telah teridentifikasi dalam beberapa studi geografi dan perencanaan wilayah, terutama di daerah yang dekat dengan pusat industri (Djakaria M Nur, 2007).

### **1. Konversi Lahan Pesisir**

Di wilayah pesisir, lahan seperti sawah, mangrove, dan tambak sering menjadi sasaran alih fungsi ketika industri berkembang. Sebagai contoh, dalam penelitian “Analisis Tren Perubahan Spasial Fungsi Lahan di Kawasan Pesisir” yang dilakukan di Pantura Jawa, ditemukan bahwa area pertanian dan vegetasi pesisir (seperti sawah dan hutan bakau) mengalami penurunan luas karena berubah menjadi zona permukiman dan kawasan industri (Fedriansya & Rahman, 2025).

Konversi ini biasanya dipicu oleh kebutuhan ruang untuk fasilitas industri dan juga permukiman pekerja industri yang semakin meningkat. Dalam hal ini, industri tidak hanya membutuhkan pabrik atau fasilitas produksi, tetapi juga lahan pendukung seperti kantor, gudang, dan perumahan.

### **2. Dampak Ekonomi pada Struktur Lahan**

Dalam kasus Kabupaten Bekasi, (Djakaria M Nur, 2007) menunjukkan bahwa pembangunan kawasan industri telah mengkonversi lahan pertanian seluas ribuan hektare menjadi lahan industri. Alih fungsi ini tidak hanya mengubah pemanfaatan lahan tetapi juga menggeser struktur ekonomi lokal: banyak petani beralih mata pencaharian menjadi pekerja industri.

### **3. Dampak Sosial dari Perubahan Lahan**

Alih fungsi lahan di pesisir juga membawa dampak sosial yang cukup besar. Sebagai contoh, pada Desa Banyuwangi (Manyar, Gresik), alih fungsi tambak menjadi kawasan industri mengubah pola kehidupan masyarakat pesisir.

Perubahan ini meliputi:

- Pergeseran mata pencaharian: nelayan / petani tambak beralih menjadi pekerja industri.
- Ketegangan sosial: konflik potensi antara penduduk lokal (yang sebelumnya bergantung pada tambak) dan investor industri terkait lahan dan penggunaan ruang.
- Perubahan kepemilikan lahan: sebagian lahan tambak dibeli dan diubah menjadi lahan industri, yang menyebabkan hilangnya kontrol penduduk lokal terhadap lahan pesisir yang sebelumnya produktif.

#### 4. Dampak Lingkungan Lokal

Konversi lahan pesisir akibat industri tidak hanya soal ruang, tetapi juga kualitas lingkungan. Beberapa dampak lingkungan yang muncul antara lain:

- Degradasi ekosistem pesisir: ketika hutan bakau atau vegetasi pesisir dikonversi, fungsi ekologis pesisir seperti penahan abrasi, penyaring polutan, atau habitat biota laut menurun.
- Pencemaran tanah dan air: aktivitas industri bisa menghasilkan limbah padat atau cair yang menurunkan kualitas tanah dan air di sekitarnya. Dalam alih fungsi lahan tambak udang (sebagai contoh industri perikanan), penelitian menemukan bahwa limbah tambak berdampak pada kualitas air dan kesuburan lahan (Munandar & Fajrun, 2024).
- Pertumbuhan permukiman yang tidak terkendali: setelah lahan dikonversi, ada kemungkinan muncul permukiman pekerja industri, yang jika tidak ditata dengan baik bisa menekan ruang terbuka hijau dan mempercepat degradasi lingkungan pesisir.

#### 5. Implikasi Tata Ruang dan Kebijakan Perubahan tata guna lahan karena industri menuntut intervensi kebijakan dan perencanaan ruang yang efektif:

- Pemerintah lokal perlu memperkuat regulasi tata ruang agar alih fungsi lahan pesisir tidak merusak fungsi konservasi.

## **DAMPAK AKTIVITAS INDUSTRI TERHADAP PERUBAHAN TATA GUNA LAHAN DAN URBANISASI DI WILAYAH PESISIR**

- Penataan industri harus mempertimbangkan zonasi agar lahan industri tidak menekan area lahan kritis atau lahan hijau pesisir.
- Perlunya program mitigasi lingkungan seperti rehabilitasi mangrove, pembuatan buffer zone, dan sistem pengelolaan limbah yang ramah lingkungan.

### **Pengaruh Industri Terhadap Urbanisasi**

Pertumbuhan industri merupakan salah satu faktor utama yang mendorong terjadinya urbanisasi, terutama di wilayah pesisir yang memiliki akses strategis terhadap jalur transportasi dan perdagangan. Kehadiran kawasan industri menciptakan tarikan ekonomi berupa lapangan kerja dan pendapatan yang lebih stabil sehingga masyarakat dari wilayah pedesaan terdorong untuk bermigrasi ke wilayah pesisir. Selain itu, pembangunan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, fasilitas listrik, dan pusat layanan publik turut memperkuat daya tarik kawasan industri sebagai lokasi pemukiman baru.

Proses urbanisasi yang dipicu oleh perkembangan industri menyebabkan perubahan struktur ruang kota, seperti munculnya kawasan permukiman padat, pusat perdagangan baru, dan alih fungsi lahan dari pertanian atau konservasi menjadi area industri atau pemukiman. Perubahan ini meningkatkan dinamika sosial masyarakat pesisir, misalnya pergeseran mata pencaharian dari sektor perikanan menuju sektor industri dan jasa.

Meski memberikan manfaat ekonomi, urbanisasi akibat industri juga menghadirkan berbagai permasalahan. Pertumbuhan penduduk yang cepat tidak selalu diikuti dengan perencanaan ruang yang baik, sehingga muncul permukiman kumuh, peningkatan kemacetan, tekanan pada sumber daya alam, dan ketimpangan sosial antara pendatang dan masyarakat lokal (Setiawan, 2019). Kondisi ini menunjukkan bahwa hubungan antara industri dan urbanisasi memiliki dampak kompleks yang memerlukan pengelolaan wilayah pesisir secara lebih terarah dan berkelanjutan.

### **Dampak Sosial Ekonomi Dari Perubahan Lahan Dan Urbanisasi**

Perubahan penggunaan lahan dan urbanisasi merupakan proses yang berkaitan erat, terutama ketika wilayah pedesaan berkembang menjadi kawasan perkotaan melalui alih fungsi lahan seperti sawah, ladang, dan hutan menjadi permukiman, industri, maupun



infrastruktur. Proses ini tidak hanya mengubah bentuk fisik wilayah, tetapi juga struktur sosial dan ekonomi masyarakat (Aluman, 2024).

Dari sisi ekonomi, urbanisasi dapat membuka kesempatan kerja baru di sektor industri, perdagangan, dan jasa. Banyak masyarakat memperoleh peningkatan pendapatan ketika lahan mereka dibeli atau disewa untuk pembangunan. Namun, keuntungan ini tidak merata. Banyak petani kehilangan lahan dan harus beralih ke sektor informal dengan pendapatan rendah. Konversi lahan dalam skala besar juga berdampak pada menurunnya produksi pangan lokal, mengurangi pendapatan petani, dan mengancam ketahanan pangan daerah (Rumasoreng et al., 2024). Berkurangnya lahan produktif menyebabkan suplai pangan semakin bergantung pada daerah lain, sehingga harga pangan menjadi tidak stabil.

Sementara itu, dampak sosial dari urbanisasi terlihat pada perubahan struktur demografis dan gaya hidup masyarakat. Arus migrasi dari desa ke kota meningkatkan jumlah penduduk kota secara signifikan, sehingga mempengaruhi pola interaksi sosial. Nilai-nilai tradisional dan ikatan sosial yang kuat di pedesaan mulai melemah, tergantikan oleh pola hubungan yang lebih individualistik. Studi di Desa Cikeruh, Jatinangor, menemukan bahwa urbanisasi membuat perubahan besar dalam pola hidup masyarakat, termasuk perubahan solidaritas sosial dan melemahnya nilai budaya lokal.

Selain itu, urbanisasi yang tidak terkendali sering menyebabkan ketimpangan sosial. Pendatang yang memiliki modal lebih dapat mengakses perumahan layak, sementara sebagian masyarakat harus tinggal di kawasan kumuh dengan fasilitas terbatas. Tekanan pada layanan sosial seperti sekolah, puskesmas, air bersih, dan transportasi semakin meningkat. Akibatnya, muncul ketimpangan sosial dan meningkatnya beban pelayanan publik.

Urbanisasi juga membawa dampak lingkungan yang berimbas pada kondisi sosial-ekonomi penduduk. Alih fungsi lahan mengurangi ruang terbuka hijau dan area resapan air, sehingga meningkatkan risiko banjir, penurunan kualitas udara, dan suhu panas perkotaan. Kondisi ini membuat biaya hidup meningkat, khususnya bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Pemerintah pun harus mengeluarkan anggaran lebih besar untuk pembangunan dan mitigasi risiko lingkungan (Sarastika et al., 2024).

Secara keseluruhan, perubahan lahan dan urbanisasi merupakan proses yang membawa peluang sekaligus tantangan. Pertumbuhan ekonomi dapat terjadi melalui

## **DAMPAK AKTIVITAS INDUSTRI TERHADAP PERUBAHAN TATA GUNA LAHAN DAN URBANISASI DI WILAYAH PESISIR**

aktivitas industri dan jasa, tetapi di sisi lain, ketimpangan sosial, kerentanan lingkungan, dan penurunan kesejahteraan petani dapat muncul tanpa perencanaan tata ruang yang tepat. Karena itu, pemerintah perlu menerapkan kebijakan yang berpihak pada keberlanjutan dengan melindungi lahan produktif, memperkuat layanan sosial, dan meningkatkan keterampilan masyarakat lokal agar mereka mampu beradaptasi dalam perubahan yang terjadi.

### **Dampak Lingkungan Dari Perubahan Tata Guna Lahan**

Perubahan tata guna lahan, seperti konversi hutan, lahan pertanian, atau area resapan air menjadi kawasan permukiman, industri, dan infrastruktur, memberikan dampak signifikan terhadap kondisi lingkungan. Salah satu dampak paling nyata adalah meningkatnya risiko banjir dan kekeringan. Ketika lahan hijau digantikan dengan bangunan dan permukaan kedap air, kemampuan tanah untuk menyerap air menurun drastis, sehingga volume limpasan permukaan meningkat. Hal ini menyebabkan wilayah yang sebelumnya jarang banjir menjadi lebih rentan terhadap genangan dan banjir musiman (Rahardjo et al., 2019).

Selain banjir, perubahan tata guna lahan berkontribusi pada penurunan kualitas tanah. Hilangnya vegetasi menyebabkan erosi lebih mudah terjadi, lapisan tanah subur menipis, dan struktur tanah menjadi tidak stabil. Erosi yang terus-menerus dapat menurunkan kapasitas tanah untuk mendukung pertanian dan vegetasi lainnya, sehingga memperburuk degradasi lingkungan. Pada lahan gambut, alih fungsi lahan bahkan dapat menyebabkan penurunan muka air tanah, mempercepat proses oksidasi gambut, dan meningkatkan emisi karbon ke atmosfer (F. Adji et al., 2017).

Perubahan tata guna lahan juga memengaruhi kualitas air dan keseimbangan hidrologi. Ketika vegetasi alami digantikan oleh areal pertanian intensif atau kawasan terbangun, tingkat polusi air meningkat akibat limpasan yang membawa sedimen, pupuk, pestisida, dan limbah permukiman. Hal ini mengganggu ekosistem sungai, danau, maupun sumber air tanah.

Dampak lainnya adalah hilangnya keanekaragaman hayati. Konversi hutan, mangrove, dan padang rumput menghilangkan habitat alami bagi flora dan fauna. Spesies endemik yang hanya hidup di ekosistem tertentu menjadi paling rentan terhadap

kepunahan. Studi di berbagai daerah menunjukkan bahwa semakin luas lahan yang dialihfungsikan, semakin besar penurunan jumlah spesies di wilayah tersebut.

Alih fungsi lahan di wilayah pesisir—khususnya mangrove—menimbulkan dampak tambahan berupa meningkatnya risiko abrasi, gelombang pasang, dan banjir rob. Mangrove memiliki fungsi ekologis sebagai penahan gelombang dan penyimpan karbon. Ketika mangrove dikonversi menjadi tambak atau kawasan wisata, perlindungan alami pesisir hilang, sehingga daerah-daerah pesisir menjadi lebih rawan terhadap bencana hidrometeorologi (Alifya & Muttaqien, 2025).

Secara keseluruhan, perubahan tata guna lahan memberikan rangkaian dampak lingkungan yang saling terkait: mulai dari meningkatnya frekuensi banjir, kerusakan tanah, hilangnya keanekaragaman hayati, peningkatan emisi karbon, hingga kerusakan fungsi ekosistem. Karena itu, pengelolaan tata guna lahan yang berkelanjutan menjadi kebutuhan mendesak agar kerusakan lingkungan tidak semakin meluas dan dapat diminimalkan di masa depan.

## **Tantangan Dan Implikasi Bagi Pengelolaan Wilayah Pesisir**

### **A. Tantangan Pengelolaan Wilayah Pesisir**

#### **1. Kerusakan Ekosistem Pesisir**

Ekosistem pesisir seperti mangrove, terumbu karang, dan padang lamun mengalami tekanan akibat eksploitasi sumber daya, konversi lahan, serta pembangunan kawasan wisata dan industri. Kerusakan ini mengurangi kemampuan ekosistem dalam menyediakan jasa lingkungan penting seperti perlindungan pantai dari abrasi dan penopang keanekaragaman hayati.

#### **2. Abrasi dan Kenaikan Muka Air Laut**

Pesisir menghadapi risiko abrasi yang makin parah akibat hilangnya vegetasi pelindung serta perubahan iklim. Kenaikan muka air laut mengancam permukiman, infrastruktur, dan lahan produktif yang berada di zona pesisir.

#### **3. Pencemaran Laut**

Limbah industri, domestik, dan aktivitas perikanan turut menurunkan kualitas air laut. Pencemaran ini berdampak pada kesehatan

## **DAMPAK AKTIVITAS INDUSTRI TERHADAP PERUBAHAN TATA GUNA LAHAN DAN URBANISASI DI WILAYAH PESISIR**

masyarakat pesisir serta memengaruhi hasil tangkapan nelayan karena berkurangnya populasi ikan.

### **4. Konflik Pemanfaatan Ruang**

Banyak kepentingan bersinggungan di wilayah pesisir: pariwisata, perikanan, pelabuhan, industri, hingga konservasi. Tanpa tata ruang yang jelas, konflik antar-sektor sering terjadi dan menghambat pengelolaan wilayah secara berkelanjutan.

### **B. Implikasi Pengelolaan Wilayah Pesisir**

#### **1. Perlu Penguatan Tata Ruang Pesisir**

Pengelolaan wilayah pesisir membutuhkan pendekatan Integrated Coastal Zone Management (ICZM) untuk mengurangi konflik pemanfaatan ruang. Pendekatan ini menekankan kolaborasi antar-sektor, pengendalian pembangunan, serta perlindungan ekosistem pesisir.

#### **2. Peningkatan Ketahanan Masyarakat Pesisir**

Dengan tingginya risiko bencana iklim seperti abrasi dan banjir rob, masyarakat pesisir memerlukan program adaptasi, termasuk rehabilitasi mangrove, penataan permukiman, serta diversifikasi sumber penghidupan untuk mengurangi kerentanan ekonomi.

#### **3. Penguatan Regulasi dan Penegakan Hukum**

Pengelolaan pesisir perlu didukung oleh regulasi yang kuat, pengawasan terhadap pencemaran, dan sanksi terhadap pelanggaran. Penegakan hukum yang konsisten sangat penting untuk menjaga kelestarian sumber daya pesisir.

#### **4. Ketersediaan Data dan Kajian Ilmiah**

Perencanaan pesisir membutuhkan data spasial dan ekologis yang akurat. Pemerintah harus menyediakan sistem informasi pesisir yang terintegrasi untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti ilmiah.

### **Analisis Keterkaitan Industri – Perubahan Lahan – Urbanisasi**

Perkembangan industri memiliki hubungan yang sangat erat dengan perubahan tata guna lahan dan proses urbanisasi. Ketika sektor industri berkembang di suatu

wilayah, kebutuhan akan ruang produksi, infrastruktur pendukung, dan tenaga kerja meningkat. Kondisi ini mendorong terjadinya perubahan lahan secara besar-besaran, terutama dari lahan pertanian atau lahan kosong menjadi kawasan industri, permukiman pekerja, dan jaringan transportasi (Widianingsih, 2018). Alih fungsi lahan tersebut tidak hanya mengubah struktur fisik wilayah, tetapi juga menimbulkan perubahan sosial ekonomi yang memicu urbanisasi.

Industri menjadi magnet bagi perpindahan penduduk dari desa ke kota. Kesempatan kerja yang lebih besar dan pendapatan yang dianggap lebih stabil di kawasan industri menarik masyarakat untuk melakukan migrasi. Arus migrasi ini mempercepat peningkatan jumlah penduduk perkotaan sehingga urbanisasi terjadi baik secara alami maupun terinduksi oleh kebijakan pembangunan. Ketika urbanisasi berlangsung cepat, kebutuhan lahan untuk permukiman, fasilitas publik, dan pusat ekonomi bertambah, sehingga tekanan terhadap ruang semakin meningkat dan memicu konversi lahan yang lebih luas.

Pada saat yang sama, perubahan lahan yang masif memperkuat perkembangan industri itu sendiri. Ketersediaan lahan untuk pabrik, gudang, kawasan bisnis, dan akses transportasi menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru (*growth centers*) yang mempercepat integrasi wilayah dengan pasar nasional ataupun global. Namun, proses ini juga menghasilkan ketimpangan antarwilayah karena desa atau daerah yang kehilangan lahan pertanian mengalami penurunan kapasitas ekonomi, sementara kawasan industri terus berkembang.

Keterkaitan timbal balik antara industri, perubahan lahan, dan urbanisasi bersifat siklik. Industri memicu perubahan lahan; perubahan lahan membuka ruang bagi pemukiman dan fasilitas perkotaan; urbanisasi memberikan surplus tenaga kerja dan pasar baru; lalu pertumbuhan penduduk kota meningkatkan permintaan industri dan memperluas konversi lahan. Siklus ini dapat menghasilkan kemajuan ekonomi, tetapi jika tidak dikelola dengan perencanaan ruang yang matang, dapat menimbulkan masalah lingkungan, konflik penggunaan ruang, dan kesenjangan sosial (Firman, 2019).

Dengan demikian, hubungan industri–perubahan lahan–urbanisasi merupakan sistem yang saling mempengaruhi. Pengelolaan yang berkelanjutan membutuhkan tata ruang yang ketat, perlindungan terhadap lahan produktif, dan pemerataan pembangunan agar manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih adil oleh seluruh lapisan masyarakat.

# **DAMPAK AKTIVITAS INDUSTRI TERHADAP PERUBAHAN TATA GUNA LAHAN DAN URBANISASI DI WILAYAH PESISIR**

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Aktivitas industri di wilayah pesisir membawa pengaruh yang sangat signifikan terhadap perubahan tata guna lahan, dinamika sosial-ekonomi, serta proses urbanisasi. Pertumbuhan sektor industri mendorong alih fungsi lahan secara besar-besaran dari lahan pertanian, tambak, dan kawasan mangrove menjadi kawasan industri, permukiman, dan infrastruktur pendukung. Konversi lahan ini tidak hanya mengubah struktur ruang, tetapi juga berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan, hilangnya fungsi ekologis pesisir, serta meningkatnya risiko bencana seperti banjir rob, abrasi, dan degradasi ekosistem.

Di sisi sosial-ekonomi, perkembangan industri menciptakan peluang kerja baru yang mendorong arus migrasi dan mempercepat urbanisasi. Namun, urbanisasi yang berkembang tanpa perencanaan menimbulkan berbagai persoalan, seperti meningkatnya permukiman padat, perubahan mata pencaharian, ketimpangan sosial, dan bertambahnya tekanan terhadap layanan publik. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan industri dan urbanisasi memiliki keterkaitan kuat yang membentuk dinamika baru di wilayah pesisir, tetapi juga menghasilkan tantangan besar bagi keberlanjutan ruang dan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, pengelolaan wilayah pesisir perlu diarahkan pada pendekatan yang berkelanjutan melalui pengendalian alih fungsi lahan, perlindungan ekosistem pesisir, penataan kawasan industri, serta penguatan regulasi dan tata ruang. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku industri menjadi kunci dalam memastikan bahwa pembangunan pesisir dapat berlangsung secara adil, teratur, dan mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Alifya, A. N., & Muttaqien, A. R. P. (2025). Studi Literatur: Dampak Bencana Banjir Rob Akibat Alih Fungsi Lahan Mangrove Bagi Kehidupan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, 4(2), 44–55.
- Aluman, A. (2024). 18512-18532. *Journal Of Social Science Research*, 4 Nomor 3(Dampak Urbanisasi Terhadap Perubahan Penggunaan Lahan, Sosial-Ekonomi Masyarakat Pada Daerah Aliran Sungai Liliba di Kelurahan Tuak Daun Merah Kota Kupan NTB), 18512–18532.

- Djakaria M Nur. (2007). Dampak Pembangunan Kawasan Industri di Kabupaten Bekasi Terhadap Alih Fungsi Lahan dan Mata Pencaharian Penduduk. *Gea: Jurnal Geografi*, 7(2).
- F. Adji, F., Damanik, Z., Yulianti, N., Birawa, C., Handayani, F., Natalia Sinaga, A., Teguh, R., & Dohong, S. (2017). Dampak Alih Fungsi Lahan Terhadap Sifat Fisik Tanah Dan Emisi Karbon Gambut Transisi Di Desa Kanamit Barat Kalimantan Tengah. *Jurnal Pedon Tropika*, 3, 79–88.
- Fedriansya, D. F., & Rahman, B. (2025). Analisis Tren Perubahan Spasial Fungsi Lahan di Kawasan Pesisir. *Jurnal Plano Buana*, 6(1), 19–27.
- Firman, T. (2019). Urbanisasi dan Perkembangan Kota di Indonesia. *Jurnal Perkotaan*, 14(2), 75–90.
- Munandar, A., & Fajrun, M. (2024). Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Ke Industri Tambak Udang Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Desa Sangiang Kecamatan Wera Kabupaten Bima. 04(02), 150–159.
- OKNIARTI, I. (2010). *ANALISIS LINGKUNGAN INDUSTRI WILAYAH PESISIR PUGER KABUPATEN JEMBER*. Universitas JEMBER.
- Rahardjo, P., Junaidi, J., & Prasetyo, T. (2019). Interaksi Alih Fungsi Lahan Terhadap Banjir Dan Kekeringan. *Bangun Rekaprima*, 5(2), 33. <https://doi.org/10.32497/bangunrekaprima.v5i2.1573>
- Rumasoreng, B. A., Latuamury, B., & Siahaya, T. E. (2024). Dampak Faktor Sosial Ekonomi terhadap Perubahan Tutupan Lahan di Daerah Aliran Sungai Waerupa, Negeri Hukurila, Kota Ambon. *Jurnal Geografi, Lingkungan & Kesehatan*, 2(2), 129–145.
- Sarastika, T., Yudhistira Saraswati, Riska Aprilia Triyadi, & Yusuf Susena. (2024). Pemodelan Prediksi Konversi Penggunaan Lahan Berbasis Ann-Ca Di Wilayah Peri-Urban Kabupaten Sleman. *Jurnal Tanah Dan Sumberdaya Lahan*, 11(1), 161–173. <https://doi.org/10.21776/ub.jtsl.2024.011.1.18>
- Setiawan. (2019). Urbanisasi dan Transformasi Kota di Indonesia. *Jurnal PWK*, 30(1), 1–12.
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Widianingsih, I. (2018). *Perubahan Tata Guna Lahan dan Dampaknya terhadap Pengembangan Wilayah*. Gadjah Mada University Press.